

KI HADJAR DEWANTARA, BERPOLITIK DENGAN AKAL BUDI DAN HATI NURANI

Bambang Purwanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur, Sleman, DIY
bambang.fib@ugm.ac.id

Abstrak

Narasi besar historiografi Indonesia dan memori kolektif bangsa tentang Ki Hadjar Dewantara selama ini hanya dibatasi pada kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan bersama Taman Siswa, sebagai sesuatu yang terpisah dari kesadaran dan kegiatan politik kebangsaannya. Padahal terdapat banyak bukti yang dapat diinterpretasikan bahwa Ki Hadjar Dewantara menjadikan Taman Siswa bukan hanya sebagai sebuah lembaga pengajaran dan pendidikan, melainkan representasi jati diri merdeka dari kesadaran kebangsaan Indonesia. Sebagai sebuah keutuhan cara berpikir, perilaku, dan tindakan, semua kegiatan Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan perwujudan dari politik identitas untuk membedakan diri dari kolonialisme Belanda, yang tidak terlepas dari konteks besar perubahan di dalam masyarakat kolonial, dunia, dan kemanusiaan.

Kata kunci: Ki Hadjar Dewantara, Taman Siswa, politik, kebangsaan, Indonesia

KI HADJAR DEWANTARA, POLITICS WITH REASON AND CONSCIENCE

Abstract

The grand narrative of Indonesian historiography and national collective memory on Ki Hadjar Dewantara has been limited to historical facts related to education and culture within Taman Siswa, as something separate from his national awareness and political activities. In fact, there are a lot of evidences that can be interpreted that Ki Hadjar Dewantara functioned Taman Siswa not only as teaching and educational institution, but also as a representation of independent identity of the Indonesian nationalism consciousness. As a whole way of thinking, behaving, and acting, all of Ki Hadjar Dewantara's activities in the fields of education and culture are manifestation of political identity to distinguish himself from Dutch colonialism, which cannot be separated from the great context of changes in colonial society, the world, and humanity.

Keywords: Ki Hadjar Dewantara, Taman Siswa, politics, nationalism, Indonesia

1. PENGANTAR

Dalam narasi sejarah bangsa Indonesia, Ki Hadjar Dewantara yang dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 selalu dihubungkan dengan berbagai kegiatannya di dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia melalui perguruan Taman Siswa. Tokoh yang sebelumnya bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat¹ ini, tidak hanya dikenal sebagai Bapak Taman Siswa karena perannya yang besar dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan bernuansa kebangsaan itu sejak masa kolonial Belanda sampai akhir hayatnya. Ia juga menjadi orang pertama yang dipercayai oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menakhodai kementerian yang bertanggung jawab pada bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan di kabinet pertama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Tidak beberapa lama setelah meninggal dunia pada 26 April 1959, Ki Hadjar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia, yang ditandai dengan penggunaan tanggal kelahirannya sebagai waktu simbolik dari peringatan hari pendidikan nasional Indonesia. Penggalan dari semboyan Ki Hadjar Dewantara yaitu “Tut Wuri Handayani”, di kemudian hari juga menjadi bagian dari logo Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan itu. Sebelum itu pada 1956, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta telah menganugerahkan gelar doktor kehormatan dalam ilmu kebudayaan karena Ki Hadjar Dewantara “telah mengamalkan jasa yang sangat besar terhadap nusa dan bangsa Indonesia dalam lapangan kebudayaan” (Universitas Gadjah Mada: 1956).

Pengakuan itu tentu saja merupakan sesuatu yang membanggakan serta melegakan, yang menunjukkan penghargaan sangat tinggi telah diberikan kepada Ki Hadjar Dewantara. Walaupun begitu, penghargaan itu ternyata tetap saja meninggalkan satu ruang kosong dalam narasi sejarah Indonesia tentang tokoh yang berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman di Yogyakarta ini, yaitu kegiatan politiknya. Politik seakan-akan tidak dianggap sebagai kosa kata wajib dalam penulisan sejarah tentang Ki Hadjar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Soewandi itu. Padahal merujuk pada beberapa tulisan sejarah tentang pergerakan kebangsaan Indonesia, kata radikal dan revolusioner selalu melekat pada diri Ki Hadjar Dewantara dalam konteks perjuangan melawan sistem dan kekuasaan kolonial Belanda (D.M.G. Koch: 1950; Taufik Abdullah: 2012).

Seperti juga yang dialami oleh sebagian besar para penggiat kesadaran kebangsaan Indonesiayang tidak pernah ragu terhadap resiko dari pergerakan politiknya, penjara merupakan bagian dari kehidupan Ki Hadjar Dewantara karena pendapat, sikap, dan tindakannya yang selalu mengusik kemapanan kekuasaan politik pemerintah Hindia Belanda. Bersama-sama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan E.F.E. Douwes Dekker, Ki

¹ Sebelum Ejaan Yang Disempurnakan dalam bahasa Indonesia digunakan, secara umum ada dua cara menulis nama Ki Hadjar Dewantara muda dalam dokumen dan kajian-kajian yang ada selama ini, yaitu Soewardi Soerjaningrat dan Soewardi Soeryaningrat. Ki Hadjar Dewantara sendiri pernah menggunakan nama Surya Ningrat atau Suryaningrat untuk mengidentifikasi dirinya pada berbagai tulisannya di masa kolonial. Perhatikan penggunaan huruf “u” sebagai pengganti “oe” yang digunakan Ki Hadjar Dewantara untuk namanya, padahal ia menggunakan “oe” ketika menulis nama Tjipto Mangoenkoesoemo atau untuk nama kota Bandoeng, satu cara penulisan yang lazim dilakukan pada waktu itu. Tulisan ini menggunakan Soewardi Soerjaningrat, yang mengacu pada cara penulisan nama yang terdapat dalam dokumen Universitas Gadjah Mada ketika memberi gelar doktor *honoris causa* kepada Ki Hadjar Dewantara.

Hadjar Dewantara merupakan kelompok paling pertama diantara para perintis kesadaran kebangsaan Indonesia yang dipenjara oleh penguasa kolonial. Mereka akhirnya harus hidup dalam pengasingan, ketika perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia baru saja bersemi setelah kurang lebih lima tahun sejak Budi Utomo sebagai salah satu organisasi pelopor didirikan.

Dominasi unsur pendidikan dan kebudayaan yang dipisahkan secara tegas dengan aspek politik dalam ingatan bersama bangsa terhadap Ki Hadjar Dewantara, diyakini menjadi salah satu sebab utama mengapa kegiatan politiknya tidak menjadi naratif nasional sejarah Indonesia. Bahkan salah satu buku terkini yang membahas Ki Hadjar Dewantara dan diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah, secara eksplisit menggunakan anak judul “Dari Politik ke Pendidikan”. Padahal, salah satu bab dari buku itu menggunakan judul “Gagasan Ki Hajar Dewantara di Bidang Politik” (Djoko Marihandono (ed), 2017). Sementara itu pelacakan secara daring dengan kata kunci politik yang dipadukan dengan Ki Hadjar Dewantara, Soewardi Soerjaningrat, atau Taman Siswa, juga tidak banyak membuahkan hasil. Hampir seluruh karya-karya yang ada membahas tentang seputar aktivitas pendidikan dan kebudayaan, dengan pengecualian satu dua tulisan yang membahas tentang kegiatan Ki Hadjar Dewantara dalam dunia pers.

Semua hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa berbagai kajian ilmiah yang ada selama ini, termasuk yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, juga tidak terlalu peduli terhadap kegiatan politiknya. Kalaupun ada yang membahas, maka semua kenyataan politik Ki Hadjar Dewantara diakhiri segera setelah Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 (Abdurachman Surjomihardjo: 1964). Sebaliknya, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan hadir secara utuh pada setiap informasi tentang Ki Hadjar Dewantara sampai akhir hayatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini membahas tentang identitas politik Ki Hadjar Dewantara sebagai sebuah keutuhan cara berpikir, perilaku, dan tindakan dalam kerangka besar politik kebangsaan Indonesia yang tidak terlepas dari konteks besar perubahan dunia dan kemanusiaan, terutama pada masa kolonial Belanda. Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan pendidikan, kebudayaan, sikap dan keputusan pribadinya pada dasarnya merupakan perwujudan dari kesadaran politik kebangsaan dan kemanusiaannya. Oleh karena itu, dalam hal apakah dan sejauh manakah unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi ingatan kolektif bangsa Indonesia tentang Ki Hadjar Dewantara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari politik kebangsaan Indonesia? Mengapa politik tidak menjadi narasi utama dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia tentang Ki Hadjar Dewantara?

2. MAMBAYANGKAN POLITIK KI HADJAR DEWANTARA

Secara teoretik diasumsikan bahwa politik pendidikan dan kebudayaan pemerintah Hindia Belanda dipahami oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai salah satu wujud dari ketimpangan sumber daya dan kekuasaan, dimana penduduk Bumiputra selalu dieksklusi dan diposisikan sebagai unsur inferior. Oleh karena itu dalam konteks kesadaran kebangsaan Indonesia perlu dilakukan tindakan untuk mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya itu sehingga penduduk Bumiputra berfungsi sebagai subjek, dimana dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara memilih gerakan massal dalam ranah pendidikan, kebudayaan, dan intelektual.

Hal itu berarti, di dalam tulisan ini seluruh kenyataan politik Ki Hadjar Dewantara ditempatkan dalam konteks perjalanan perjuangan kebangsaannya, yang dilakukan melalui berbagai strategi atau ruang bergerak, mulai dari partai politik sampai dengan kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Strategi berpolitik melalui ruang pendidikan dan kebudayaan dipahami bukan sebagai penurunan perhatian atau penisbian Ki Hadjar Dewantara terhadap politik, melainkan perwujudan dari kematangan berpolitik itu sendiri. Atau dengan kata lain, Ki Hadjar Dewantara mewujudkan ide-ide dan prinsip-prinsip politiknya dimulai atau ke dalam kegiatan di partai politik, dan kemudian meneruskannya ke sekolah, ruang intelektual, dan kesenian.

Selain itu, aktivitas pendidikan dan kebudayaan Ki Hadjar Dewantara dibayangkan juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pembagian kerja sebagai tanggung jawab diantara para elite Bumiputra di Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Selasa Kliwon yang berpusat di Taman Siswa, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran akan jati diri yang terpisah dari entitas dan identitas kolonial. Jika Ki Ageng Soejomentaram bertanggung jawab terhadap generasi tua, maka Ki Hadjar Dewantara mendapat tugas mempersiapkan generasi muda bangsa (Marcel Bonneff and Susan Crossley: 1993). Aktivitas itu kemudian berkembang lebih lanjut, menyusul pembentukan organisasi Pakempalan Kawula Ngayogyakarta (PKN) yang dipimpin oleh Pangeran Soerjodiningrat pada awal 1930-an. Pada kongres kedua PKN pada 1932, Ki Hadjar Dewantara menyampaikan ide radikalnya tentang pendidikan untuk masyarakat (Marcel Bonneff and Susan Crossley: 1993; William J. O'Malley: 1978), sebagai antitesa dari pendidikan kolonial.

Merujuk pada pendapat Pranata SSP salah seorang penulis biografi Ki Hadjar Dewantara, tulisan ini berpijak pada asumsi bahwa politik yang merupakan nafas pertama dari suami R.A. Soetartinah Sasraningrat yang dikenal dengan nama Nyi Hadjar Dewantara ini (Pranata SSP: 1959), terus mewarnai perjalanan Ki Hadjar Dewantara walaupun ada label lain, yaitu pendidikan dan kebudayaan dalam narasi besar sejarah yang melekat pada dirinya. Asumsi ini dibangun dengan tujuan untuk mendekonstruksi narasi besar historiografi Indonesia, yang selama ini membatasi Ki Hadjar Dewantara hanya pada kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan sebagai sesuatu yang terpisah dari kesadaran dan kegiatan politik kebangsaannya. Perspektif yang didasarkan pada prinsip yang terpisah itu dalam jangka panjang berakibat pada peminggiran secara struktural terhadap kenyataan politik Ki Hadjar Dewantara dalam sejarah Indonesia.

Tentu saja sangat disadari bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk membebaskan diri dari tradisi cara berpikir historiografis yang berkembang selama ini. Historiografi yang bergantung pada ilmu-ilmu sosial humaniora yang telah terlalu lama menjadi perpanjangan dari tradisi orientalisme, yang selalu menempatkan kenyataan pada konteks tradisi tempatan seperti masa lalu Indonesia sekedar sebagai objek (Bambang Purwanto: 2006; Henk Schulte-Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (eds): 2008). Tradisi historiografi yang dimiliki berbagai kelompok masyarakat yang menjadi pembentuk dasar dari keberadaan Indonesia selalu dianggap inferior, dengan tingkat historisitas dan kandungan kenyataan sejarah yang dianggap minimal. Mitos dianggap sebagai muatan utama dari tradisi historiografi seperti ini, yang dicitrakan mengandung sangat sedikit kenyataan sejarah. Padahal menurut Taufik Abdullah, siapapun dirinya baik sebagai pribadi maupun kelompok selalu memerlukan mitos yang diciptakan dari masa lalu, karena “mitos adalah bagian yang isensial dari kehidupan sosial...yang bercorak integratif “. Hal itulah yang mendasari tulisan ini untuk berpaling kepada prinsip-prinsip kesadaran dekonstruksi, sebagai upaya untuk menghadirkan pemikiran tempatan sebagai kerangka dasar berpikir.

Tulisan ini memanfaatkan kenyataan filosofis dan konseptual yang ada di dalam masyarakat, dimana peristiwa sejarah itu terjadi sebagai subjek. Oleh karena itu kerangka dasar berpikir dari tulisan ini dibangun dengan memanfaatkan konsep-konsep yang ada di sekitar kenyataan sejarah Ki Hadjar Dewantara, keindonesiaan, dan kemanusiaannya. Sebagai manusia Jawa yang dibekali berbagai nilai dasar yang telah ada secara turun temurun dan pengalaman hidup yang tidak terisolasi dari kehadiran berbagai unsur-unsur baru di tengah-tengah perubahan besar yang terjadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Ki Hadjar Dewantara tidak sekedar hadir sebagai sebuah keutuhan individual melainkan juga representasi dari keutuhan jiwa zamannya yang menyadari keberadaan identitas dan entitas sebagai diri pribadi dan bagian dari sebuah bangsa yang baru. Menurut Ki Hadjar Dewantara, rasa kebangsaan merupakan “sebagian dari rasa kebatinan... manusia, yang hidup dalam jiwa... tidak dengan sengaja ... timbul dari rasa diri ... lalu menjalar jadi rasa keluarga ... terus jadi rasa hidup bersama ... nasibnya bangsa dirasakan sebagai nasibnya sendiri, kehormatan bangsa ialah kehormatan diri..” (Nayono et al., ed.: 1994).

Keberhasilan dalam berpolitik bagi Ki Hadjar Dewantara bukan untuk memerintah dan berkuasa, melainkan kebebasan yang luhur dan bertanggungjawab sebagai sebuah kebudayaan, keutuhan cipta, rasa, dan karsa sebagai “buah budi dan hasil perjuangan hidup manusia” yang selalu menikmati kebahagiaan apapun keadaan yang dihadapi. Kebudayaan merupakan “buah dari keadaban manusia” yang tidak terpisahkan dari “sifat keluhuran budi”, atau dengan kata lain “buah-buah dari keluhuran budi itu lalu dinamakan budaya” (Ki Hadjar Dewantara: 1994). Merujuk pada prinsip relativitas *mulur mungkret* ilmu bahagia “senang dan susah itu tidak berlangsung terus menerus” sebagaimana dikemukakan oleh Ki Ageng Soerjomentaram (Marcel Bonneff and Susan Crossley: 1993), Ki Hadjar Dewantara selalu menyadari resiko kesenangan dan kesusahan yang harus dihadapi atas pilihan yang dilakukannya sebagai suatu kebahagiaan sepanjang hidupnya.

Penjabaran lebih lanjut dari kerangka berpikir di atas berkaitan dengan asumsi bahwa, unsur pendidikan dan kebudayaan yang melekat pada Ki Hadjar Dewantara pada dasarnya merupakan perwujudan dari kesadaran dan tindakan politiknya yang berhadapan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda dengan sifat-sifat dasarnya yang segregatif, diskriminatif, dan eksploitatif. Sementara itu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Ki Hadjar Dewantara hadir dengan kenyataan-kenyataan sejarah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan representasi simbolik dari sebuah kekuasaan dari bangsa yang merdeka.

Oleh karena itu berpolitik bagi Ki Hadjar Dewantara di dalam Indonesia yang merdeka tetap sebagai perwujudan dari kesadaran kebangsaan, bukan media untuk mendapatkan kekuasaan. Salah satu contoh klasik dari politik pendidikan dan politik kebudayaan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat dilihat pada penegasannya tentang posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang baru merdeka, menggantikan bahasa Belanda yang merupakan representasi dari kolonialisme. Kebijakan yang dilakukannya itu merupakan perwujudan nyata dari ide yang sudah ia kemukakan dalam sebuah tulisan yang diterbitkan sekitar tahun 1916 dan 1917 tentang betapa pentingnya satu bahasa nasional bagi sebuah bangsa (Nayono et al. ed: 1994).

3. PEMINGGIRAN HISTORIOGRAFIS

Eksklusi dan inklusi merupakan salah satu ciri yang selalu ada dalam setiap penulisan sejarah, mengingat adanya intersubjektivitas yang selalu menyertai setiap konstruksi sejarah, sesuai dengan perspektif dasar yang digunakandan tujuan masing-masing diproduksi karya sejarah itu (Sartono Kartodirdjo: 1992; Kuntowijoyo: 1995). Seperti telah disebutkan di atas, salah satu ciri dari historiografi Indonesia adalah tereksklusinya kenyataan politis Ki Hadjar Dewantara dari narasi nasional sejarah Indonesia. Secara historiografis, paling tidak ada dua alasan penting yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan eksklusi ini. Pertama, adanya peminggiran atas peran Indische Partij atau Sarekat Hindia dalam penulisan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kedua, hilangnya peran Ki Hadjar Dewantara dalam penulisan sejarah tentang Sarekat Islam dan Budi Utomo.

Indische Partij termasuk juga kemudian Nationaal Indische Partij, organisasi utama walaupun bukan satu-satunya dimana Ki Hadjar Dewantara pernah melakukan kegiatan politik secara nyata, tidak mendapat tempat yang memadai dalam narasi sejarah politik Indonesia dari masa kolonial. Hal ini berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, PNI atau bahkan Partai Komunis Indonesia, yang mendominasi memori sosial bangsa berkaitan dengan kegiatan politik dan perkembangan nasionalisme Indonesia.

Sebenarnya beberapa buku sejarah baik yang ditulis oleh sejarawan Indonesia maupun asing yang banyak menjadi rujukan, seperti buku babon *Sejarah Nasional Indonesia*, buku *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo, dan buku *Sejarah*

Indonesia Modern karangan M.C. Ricklefs, telah menghadirkan Indische Partij sebagai partai politik pertama di Indonesia, pelopor radikalisme dalam melawan sistem kolonial, menuntut demokratisasi terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan organisasi yang secara tegas menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda (Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto: 1984; Sartono Kartodirdjo: 2014; M.C. Ricklefs: 2005). Hal senada juga dapat ditemukan dalam buku babon terkini yang ditulis oleh sejarawan Indonesia, *Indonesia Dalam Arus Sejarah* yang diterbitkan di tahun 2012. Dalam bahasa Taufik Abdullah, “Indische Partij sejak semula merumuskan kehadirannya dari rasionalitas yang mengingkari keabsahan hubungan kolonial”, yang dibedakan dengan Budi Utomo yang didirikan karena “keprihatinan akan ketertinggalan masyarakat bumiputra” (Taufik Abdullah: 2012). Walaupun begitu, dalam narasi nasional sejarah Indonesia dan memori kolektif bangsa, eksistensi Indische Partij bukan merupakan salah satu pusat pergerakan kebangsaan Indonesia. Indische Partij tidak lebih hanya seperti pendamping dan perantara antara Budi Utomo dan Sarekat Islam pada periode awal dengan PNI dan PKI di periode berikutnya.

Secara teoretik, narasi tentang arti penting Indische Partij dalam sejarah Indonesia itu seharusnya berkembang di dalam masyarakat, mengingat tiga buku yang telah disebutkan di atas merupakan buku-buku utama yang menjadi rujukan dalam pembelajaran sejarah Indonesia sepanjang tiga dekade akhir abad ke-20 dan sampai saat ini. Buku *Sejarah Nasional Indonesia* sebagai contoh, tidak hanya menjadi rujukan utama di perguruan tinggi. Buku ini juga memiliki versi ringkas sebagai buku ajar resmi, yang digunakan para peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah di seluruh Indonesia pada masa Orde Baru.

Dalam kenyataannya seperti telah disebutkan di atas, pengetahuan masyarakat tentang Indische Partij sangat terbatas, dan marginalisasi terhadap peran Indische Partij dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia tidak terelakan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, apakah apriori dan ketidakpercayaan baik akademisi dan publik terhadap buku *Sejarah Nasional Indonesia* berpengaruh terhadap keadaan ini? Pertanyaan sejenis juga dapat diajukan kepada pengaruh dari minimalnya diskripsi tentang Indische Partij pada sebagian besar buku sejarah yang ada selama ini terutama yang ditulis oleh sejarawan Indonesia, ciri eksklusif dari pendidikan para sejarawan dan pengajar sejarah di perguruan tinggi, dan akhirnya adanya pemisahan yang tegas antara sistem pengetahuan, hasil penelitian di perguruan tinggi, dan melimpahnya publikasi terbaru tentang sejarah Indonesia dengan proses pembelajaran sejarah di sekolah, penulisan buku ajar, dan pengetahuan kesejarahan masyarakat. Satu hal yang pasti, dua artikel yang membahas tentang Indische Partij dalam buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* yang dianggap sebagai karya monumental sejarawan Indonesia terkini itu, tidak sepakat tentang kapan partai politik ini didirikan. Walaupun semua penulis sepakat bahwa Indische Partij didirikan di Bandung oleh E.F. E. Douwes Dekker, satu artikel menyatakan hal itu terjadi pada 6 September 1912 (Taufik Abdullah: 2012), sedangkan tulisan yang lain menulis 25 Desember 1912 (I Kethut Ardhana: 2012).

Dalam kenyataan naratif nasional sejarah Indonesia, keberadaan baik Indische Partij maupun Nationaal Indische Partij dipahami bukan sebagai kesadaran politik yang mewakili inspirasi murni politik identitas keindonesiaan. Keberanian para pendiri dan pemimpin partai ini yang melampaui jiwa zamannya yang tidak terjebak pada prinsip “orang Indonesia asli” melainkan Indonesia yang lebih luas dan beragam, harus ditebus dengan peminggiran mereka secara historiografis. Di dalam memori kolektif bangsa Indonesia, Indische Partij hanya diingat sebagai organisasi milik para Indo-Eropa, kelompok campuran Asia dan Eropa yang tidak berhak merepresentasi identitas Indonesia yang sejati. Sebagai “peranakan campuran”, para Indo-Eropa itu tetap ditempatkan sebagai orang asing dalam konteks kesadaran kebangsaan Indonesia karena ikatan biologis mereka dengan orang Eropa, yang identik dengan kekuasaan kolonial. Peminggiran historiografis yang serupa juga terjadi ketika Indische Partij telah menjelma menjadi Nationaal Indische Partij, padahal dalam kenyataannya Ki Hadjar Dewantara pernah menjadi ketua partai ini walaupun ia bukan seorang Indo-Eropa.

Penolakan terhadap unsur campuran sebagai bagian dari keindonesian itu dapat juga dijelaskan lebih jauh dengan meluasnya prinsip-prinsip “pribuminisasi” dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sejak tahun 1950-an, dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Walaupun pribuminisasi lebih merupakan slogan yang awalnya digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik para elite serta terutama bertujuan untuk membatasi peran ekonomis komunitas Tionghoa, dalam jangka panjang slogan itu mempengaruhi wacana masyarakat tentang kedudukan kelompok campuran dalam sejarah Indonesia. Namun ironisnya secara sosiologis, masyarakat di Indonesia sampai saat ini tetap memberi apresiasi yang luar biasa kepada unsur campuran genetik Timur dengan Barat dalam konteks penampilan fisik seseorang. Hal ini paling tidak dapat dicari jawabannya pada pernyataan Ki Hadjar Dewantara tentang ciri mentalitas orang Indonesia pada masa transisi. Sebagian besar masyarakat memiliki kecenderungan merasa inferior *inferiority complex* terhadap segala hal yang berkaitan dengan Eropa, dan merasa puas jika mampu menghadirkan imitasi Eropa di sekitar dirinya, seperti penampilan, bahasa yang digunakan, cara berpakaian, makanan yang disenangi, pemberian nama anak, dan banyak lagi lainnya (Ki Hadjar Dewantara: 1967).

Sementara itu dekolonisasi historiografi yang hanya bertujuan untuk membangun citra buruk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kolonialisme Barat, berimbas pada peminggiran terhadap unsur-unsur baik yang berhubungan dengan “asing totok” maupun “asing campuran” dalam kenyataan sejarah perjuangan kebangsaan Indonesia. Akibatnya, ide kebangsaan Indonesia yang inklusif tidak pernah benar-benar terbentuk, baik dalam sikap mental masyarakat secara umum maupun wacana kesejarahan yang dibentuk oleh sikap mental tersebut. Bahkan sampai batas tertentu, diskriminasi yang menjadi salah satu ciri utama dari sistem dan masyarakat kolonial ternyata diteruskan, terutama yang ditujukan kepada komunitas Tionghoa, walaupun Indonesia sudah merdeka.

Dasar berpikir di atas dapat dibandingkan lebih lanjut dengan tindakan eksklusi yang juga dialami oleh Abdul Rivai. Sama seperti E.F.E. Douwes Dekker, Abdula Rivai hadir

dengan konsep “Bangsa Hindia” untuk semua orang yang tinggal di Hindia Belanda, tanpa memperhatikan asal usul biologis dan antropologisnya. Sama seperti kenyataan politik Ki Hadjar Dewantara yang terpinggirkan, Abdul Rivai yang juga bukan berasal dari kelompok asing totok dan asing campuran, juga tidak punya tempat yang memadai dalam narasi besar historiografi pergerakan politik kebangsaan Indonesia selama ini. Ia hanya ada dalam pengetahuan sejarah pribadi atau kelompok terbatas, mereka yang tidak sengaja pernah membaca tentang masa lalu tokoh ini, bukan sebagai wujud dari mekanisme memori kolektif bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Nama Belanda yang terus melekat dan digunakan dalam penulisan sejarah baik pada Indische partij maupun Nationaal Indische Partij, sedikit banyak juga berpengaruh terhadap persepsi sejarah masyarakat dari generasi ke generasi. Walaupun ada nama lain yaitu Sarekat Hindia yang merujuk pada Indische Partij, kenyataan itu hampir-hampir tidak menjadi pengetahuan kesejarahan bangsa Indonesia. Sebagai perbandingan, masalah serupa juga dialami oleh Indische Vereniging sebelum berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Padahal menurut Taufik Abdullah, Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi mahasiswa di Negeri Belanda ini merupakan tempat “berkumpulnya semua mereka yang datang dari Hindia Belanda, entah pribumi dari segala macam etnis, entah peranakan Cina, entah Indo atau, malah juga Belanda totok”. Sekali lagi fakta ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kebangsaan yang inklusif ternyata bukan merupakan narasi nasional sejarah Indonesia yang dominan, walaupun secara politis prinsip keberagaman secara resmi dihadirkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika untuk negara Indonesia yang merdeka.

Sementara itu eksklusif yang terjadi pada Ki Hadjar Dewantara dalam konteks Sarekat Islam bahkan lebih kentara dan dramatis. Secara historiografis, keberadaan Ki Hadjar Dewantara dalam sejarah organisasi yang selalu dikaitkan dengan peran politik Islam dalam pergerakan kebangsaan Indonesia benar-benar hanya sepintas lalu saja, jika tidak mau mengatakan tidak ada sama sekali. Sebagai seseorang yang pernah memimpin Sarekat Islam cabang Bandung, nama Ki Hadjar Dewantara sangat sulit ditemukan dalam tulisan sejarah tentang Sarekat Islam, termasuk yang ditulis oleh sejarawan Indonesia.

Hal itu berbeda dengan Soerjopranoto kakaknya, yang selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan bersama Sarekat Islam. Kecuali pernyataan tentang kedudukannya sebagai ketua salah satu cabang Sarekat Islam, peran Ki Hadjar Dewantara lebih lanjut dalam sejarah Sarekat Islam hampir-hampir tidak pernah diungkapkan. Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa Mas Marco Kartodikromo yang kemudian dikenal sebagai wartawan radikal dan pendiri *Inlandsche Journalisten Bond*, belajar tentang politik mobilisasi dari Ki Hadjar Dewantara di Bandung, yang pada saat itu memimpin Sarekat Islam di kota itu (Yamamoto Nobuto: 2014).

Dalam cara pandang yang sangat mudah dianggap spekulatif, kebiasaan berpikir yang selalu mengkaitkan Sarekat Islam dengan kelompok sosial santri secara ketat menjadi salah satu sebab dari hilangnya Ki Hadjar Dewantara dari sejarah Sarekat Islam. Hal itu dapat dilihat pada hampir sebagian besar tulisan yang tidak pernah menempatkan Ki Hadjar

Dewantara dalam kategori santri, walaupun ada beberapa penulis yang memaparkan tentang pengalaman keislamannya yang kental di dalam lingkungan keluarga (Pranata SSP: 1959; Darsiti Soeratman: 1986). Jikapun ada tulisan yang menghubungkannya dengan Islam, Ki Hadjar Dewantara dikategorikan ke dalam kelompok Islam Jawa dengan ciri kebatinan, sinkritis, dan sekuler yang kuat (Ruth T. McVey: 1967; Savitri Prastiti Scherer: 1985).

Merujuk pada konsep trikotomi Clifford Geertz tentang masyarakat dan kebudayaan Jawa yang sangat berpengaruh dalam kajian tentang Indonesia, maka para penulis cenderung menempatkan Ki Hadjar Dewantara ke dalam kelompok priyayi, bukan bagian dari kelompok santri yang melekat pada identitas Sarekat Islam. Tidak bermaksud untuk mengulang hasutan yang pernah disampaikan oleh Residen Jonquiere kepada umat Islam di Yogyakarta pada masa itu, yang menyatakan bahwa Taman Siswa bersifat atheis dan anti islam sebagai perwujudan dari penolakannya terhadap perguruan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara, sebagian besar konstruksi historis dalam kenyataannya memang membuat jarak yang sangat lebar antara Ki Hadjar Dewantara dengan Islam (Abdurrachman Surjomihardjo: 1964). Akibatnya, tidak ada ruang untuk Ki Hadjar Dewantara di dalam narasi nasional sejarah Sarekat Islam.

Padahal jika tulisan dan tindakan Ki Hadjar Dewantara semasa hidupnya dibaca dan dipahami secara menyeluruh dan kritis, cucu dari Pakualam III ini selalu hadir bukan dengan retorika-retorika yang mengambang tanpa pesan, arah, dan tujuan yang pasti, melainkan sesuatu yang bernas dan menunjukkan dirinya sebagai seorang yang mampu membangun budaya dan etika politik sebagai manusia Indonesia. Merujuk pada konstruksi sejarah yang dihadirkan oleh Savitri Prastiti Scherer dalam tesis masternya di Cornell University, Ki Hadjar Dewantara yang dihadirkan berdampingan dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetomo (Savitri Prastiti Scherer: 1985), tidak pernah kehilangan kejawaan, keagamaan, dan bahkan kebangsawanan yang dibawanya karena kelahiran, ketika ia tumbuh menjadi manusia modern yang mengadopsi nilai-nilai Barat dan menyatakan Indonesia sebagai identitas diri pribadi dan identitas sosial paripurnanya. Sebuah kesadaran dan keputusan politik yang melawan prinsip-prinsip dasar kekuasaan kolonial, dan sekaligus melampaui sistem nilai masyarakat dimana dia berasal.

Ki Hadjar Dewantara memang tidak menonjolkan status kebangsawannya. Bahkan sampai batas tertentu ia ingin orang tidak tahu bahwa ia adalah bagian dari keluarga aristokrat Jawa, sebagaimana ia tunjukkan melalui perubahan identitas diri yang menanggalkan gelar aristokrasinya pada 23 Februari 1928. Walaupun begitu, roh kebangsawanan itu tetap menyertai dirinya sebagai nilai lebih dari manusia Jawa yang baru dan bertransformasi menjadi Indonesia. Biarpun Ki Hadjar Dewantara dilabelkan sebagai seorang “tradisional” di dalam tulisan Savitri Prastiti Scherer, yang dibedakan dari Soetomo sebagai seorang “juru damai” dan Tjipto Mangoenkoesoemo sebagai seorang “pembangkang” (Savitri Prastiti Scherer: 1985), Ki Hadjar Dewantara juga tidak pernah kehilangan kesadaran politik dan kebangsaannya. Apapun jenis kegiatan yang ia pilih, termasuk ketika dia memutuskan untuk menjadi bagian dari majalah *Hindia Poetra*, organ *Indische Vereeniging* yang disebut-sebut

sebagai terbitan yang didukung oleh para pebisnis Belanda, Ki Hadjar Dewantara selalu hadir dalam ruang kebangsaan Indonesia.

Keputusan itu memang berakibat pada munculnya berbagai kritik, yang menyatakan bahwa Ki Hadjar Dewantara telah kehilangan semangat perjuangan politiknya yang menggelora bagi kemerdekaan Indonesia, ketika berada di pengasingan di Eropa. Dalam kenyataannya Ki Hadjar Dewantara membuktikan bahwa ia tidak pernah kehilangan hasrat untuk menentang sistem dan kekuasaan kolonial. Ia kembali dijebloskan ke dalam penjara kolonial, kurang dari satu tahun setelah ia menginjakkan kaki kembali di tanah airnya dari pengasingan di Belanda, karena pendapat dan sikap politik kebangsaannya yang bertentangan dengan pemerintah Hindia Belanda.

Seperti juga layaknya tokoh-tokoh sejarah lainnya, Ki Hadjar Dewantara juga membawa fitranya sebagai manusia yang tidak mungkin sempurna. Namun melalui tulisan, ucapan, dan tindakannya yang terdokumentasi dengan baik, Ki Hadjar Dewantara telah membuktikan bahwa ia tidak hanya telah membuat gentar pemerintah Hindia Belanda secara politis, sehingga memenjarakan dan mengasingkannya (Kenji Tsuchiya: 1975). Ia ternyata juga menjadi inspirasi bagi berbagai kelompok baik di Indonesia maupun luar negeri yang peduli terhadap berbagai perubahan yang menciptakan kondisi peralihan di seluruh penjuru dunia, tidak hanya pada masa hidupnya melainkan juga sampai dengan akhir-akhir ini.

Sejarah politik Ki Hadjar Dewantara menjadi inspirasi untuk memahami berbagai kompleksitas dari kenyataan yang selalu terjadi pada satu identitas dan entitas politik tertentu, dan juga penguat bagi kelompok yang selama ini mengalami kesulitan menampilkan ketidakmurnian dirinya secara genealogis. Padahal berbeda dengan E.F.E. Douwes Dekker teman dekatnya dalam tiga serangkai yang memang mewakili komunitas campuran, Ki Hadjar Dewantara begitu juga dengan Tjipto Mangoenkoesoemo hadir sebagai manusia Jawa yang utuh.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika beberapa tahun lalu di Belanda, Ki Hadjar Dewantara dipilih sebagai tokoh politik pertama yang menjadi pokok bahasan utama dalam sebuah terbitan yang bertujuan sebagai bacaan pendukung bagi buku ajar yang membahas tentang politik kebudayaan dan adanya kompleksitas kebudayaan di dunia yang semakin mengglobal dan lintas nasional ini. Di dalam edisi pertama itu, dua tulisan Ki Hadjar Dewantara yaitu “Djika Saja Nederlander” atau “Als ik eens Nederlander was” (1913) dan “Een en ander over Nationaal Onderwijs en het Instituut Taman Siswa te Jogjakarta” (1935) dijadikan pokok bahasan (Wenedelien van Oldenborgh & Binna Choi (ed.): 2010; lihat juga poster “Soerat Ederan Comite Boemipoetra goena merajakan Pesta Seratoes Tahoen Keradjaan Belanda di Bandoeng”). Berbekal prinsip bahwa masa lalu tidak pernah mati, atau bahkan sesuatu yang sudah dimulai sejak lama itu belum menjadi masa lalu, penerbitan ini memanfaatkan ide-ide politik radikal Ki Hadjar Dewantara dan prinsip-prinsip yang berlaku pada Taman Siswa sebagai inspirasi untuk berhadapan dengan kekinian dan masa depan sebagai sebuah strategi.

Para penggagas terbitan ini berharap, berbagai jejak langkah dan strategi yang telah dipilih oleh Ki Hadjar Dewantara dan merupakan kenyataan sejarah itu, dapat menjadi salah satu pilihan sebagai metode belajar bagi setiap orang dan masyarakat, ketika mereka berhadapan dengan kondisi peralihan yang memerlukan ruang untuk belajar berbeda pendapat dengan tetap mampu melangkah ke depan tanpa melupakan masa lalu. Lebih lanjut dari terbitan ini juga diharapkan bahwa, setiap orang dapat belajar dari masa lalu Ki Hadjar Dewantara untuk mengerti dan menentukan arah yang tepat, seiring dengan keberagaman lintas aspek yang mempengaruhi baik struktur kekuasaan di tingkat nasional maupun terbentuknya berbagai campuran dalam struktur kekuasaan global secara keseluruhan (Wenedelien van Oldenborgh & Binna Choi (ed.): 2010). Hal ini tentu saja sebuah ironi. Ketika secara historiografis Ki Hadjar Dewantara dan kenyataan politiknya dipinggirkan di negeri sendiri, ide-ide politik yang digunakannya untuk melawan penguasa kolonial ternyata kemudian dijadikan dasar perjuangan politik di negeri asal penguasa kolonial yang dilawannya.

4. BERMULA DARI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN BUDI UTOMO

Sebagai anak laki-laki tertua Paku Alam III (1858-1864), Pangeran Soerjaningrat ayah dari Ki Hadjar Dewantara, menurut berbagai rujukan yang ada bukanlah seseorang yang kaya secara material (Darsiti Soeratman: 1986; Pranata SSP: 1959; Kenji Tsuchiya: 1975; Kenji Tsuchiya: 1992). Berbeda dengan kebanyakan bangsawan dan elite bumiputra lain yang berhasil memanfaatkan status dan kedudukan mereka untuk mengisi pundi-pundi harta bendanya, Pangeran Soerjaningrat hidup dalam kesederhanaan. Status diri Pangeran Soerjaningrat yang tidak lagi menjadi bagian langsung dari Paku Alam IV (1864-1878), Paku Alam V (1878-1900), Paku Alam VI (1901-1902), dan Paku Alam VII (1903-1938) yang berturut-turut menjadi penguasa Kadipaten Pakualaman menggantikan ayahnya Paku Alam III, berakibat langsung pada hilangnya sebagian besar hak-hak sosial dan ekonomis khusus yang hanya melekat pada keluarga yang sedang berkuasa.

Walaupun begitu, warisan status sosial dan lingkungan Kadipaten Pakualaman di paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 sangat berpengaruh terhadap eksistensi Ki Hadjar Dewantara. Sebagai salah satu pewaris dinasti Mataram, Kadipaten Pakualaman terus mempertahankan tradisi intelektualitasnya dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat kolonial pada masa itu, dengan tetap mempertahankan ciri kejawaannya². Hal ini kemudian membuka ruang yang luas bagi anak-anak Pangeran Soerjaningrat ikut serta dalam arus besar “kemajuan” dan “kemodernan”, tidak terkecuali Ki Hadjar Dewantara muda (Darsiti Soeratman: 1986).

² Sebenarnya pada masa Paku Alam V, tradisi kesusastraan dan kesenian Jawa agak terabaikan karena keluarga Pakualaman lebih memperhatikan aspek intelektualitas baru seiring dengan perkembangan pendidikan Barat. Akan tetapi sesuatu yang berbeda berlangsung dalam keluarga Pangeran Soerjaningrat, dimana tradisi kejawaan bersama-sama dengan keislaman tetap menjadi bagian penting di dalam keluarganya. Ki Hadjar Dewantara muda bersama saudara-saudaranya dibesarkan dalam tradisi Jawa yang kuat bersama-sama dengan unsur-unsur modern yang diadopsi dari Barat. Baru pada masa Paku Alam VII, tradisi kejawaan kembali mendapat perhatian yang serius oleh penguasa pada waktu itu (Darsiti Soeratman: 1986).

Ketika tidak banyak anak-anak bumiputra berkesempatan belajar di sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa Belanda *Europeesche Lagere School* (ELS), Ki Hadjar Dewantara muda menikmati kesempatan itu dengan baik, meskipun sekolah tempat ia belajar berstatus lebih rendah daripada sekolah dimana para sepupunya yang menjadi bagian langsung dari penguasa Pakualaman pada waktu itu menempuh pendidikan Barat. Setamat dari ELS, Ki Hadjar Dewantara muda kemudian berharap untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru yang juga berbahasa pengantar bahasa Belanda, yaitu *Kweekschool* di Yogyakarta.

Cita-cita awal menjadi seorang guru tertunda untuk sementara. Ki Hadjar Dewantara muda memulai langkah baru, yang ternyata memberi dasar penting dalam pembentukan sikap hidup dan jati dirinya di kemudian hari. Ia meninggalkan Yogyakarta untuk hidup mandiri dan belajar di sekolah kedokteran *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA) di Jakarta, yang pada saat itu dikenal sebagai Batavia atau Betawi pada 1903.

Berdasarkan data yang tersedia, tidak terlalu pasti siapa sebenarnya yang mempengaruhi Ki Hadjar Dewantara muda untuk melupakan *Kweekschool* dan melanjutkan pendidikannya ke STOVIA. Menurut Darsiti Soeratman, keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke STOVIA itu terjadi setelah Wahidin Soedirohoesodo datang ke Pakualaman, tidak lama setelah Ki Hadjar Dewantara muda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke *Kweekschool*. Dalam kunjungan itu, Wahidin Soedirohoesodo menawarkan pendidikan lanjut dengan beasiswa di STOVIA untuk para kerabat Pakualaman, dan Ki Hadjar Dewantara muda merupakan salah satu dari kerabat Pakualaman yang akhirnya mengambil kesempatan itu (Darsiti Soeratman: 1986).

Berbeda dengan masa kini ketika seseorang memulai pendidikan kedokteran bukan pada usia anak-anak, Ki Hadjar Dewantara muda bersama rekan-rekannya memasuki pintu gerbang STOVIA dan memulai hidup sebagai penduduk kota Jakarta pada usia 14 tahun, usia yang tentu saja belum dapat dikatakan matang untuk dibebani tanggung jawab yang besar. Paling tidak ada tiga alasan yang dapat dihubungkan dengan keputusan Ki Hadjar Dewantara muda menerima tawaran belajar di STOVIA. Pertama, Ki Hadjar Dewantara muda nampaknya telah tertarik dengan ide-ide Wahidin Soedirohoesodo, yang pada saat itu sedang berkeliling ke berbagai daerah untuk mempropagandakan gagasannya tentang perluasan pendidikan bagi penduduk bumiputra dan membangun kesadaran kebangsaan di kalangan orang Jawa.

Sebagai aristokrat yang bukan berasal dari keluarga langsung dari Paku Alam yang sedang berkuasa, Ki Hadjar Dewantara muda harus berhadapan dengan berbagai diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan Wahidin Soedirohoesodo seakan-akan memberi jalan untuk memiliki wawasan yang lebih luas tentang sistem dan masyarakat kolonial. Kedua, ketersediaan beasiswa untuk masa pendidikan yang lama menjadi salah satu pertimbangan, ketika kondisi ekonomi keluarga sangat terbatas karena tidak ada lagi hak-hak istimewa diperoleh orang tuanya. Ketiga, mengikuti jejak kakaknya Soerjopranoto, pribadi progresif yang kemudian menjadi pemimpin gerakan buruh yang sangat disegani pemerintah kolonial. Soerjopranoto telah lebih dahulu meninggalkan rumah, baik untuk

belajar di sekolah pamong praja di Magelang, bekerja, dan akhirnya kemudian belajar pada sekolah pertanian di Bogor (Budiawan: 2006).

5. INDONESIA YANG INKLUSIF

Merujuk pada ide peminggiran historiografis yang telah dibahas di atas, keberadaan Ki Hadjar Dewantara di STOVIA hampir-hampir luput dari konstruksi sejarah Indonesia dan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah di kemudian hari. Episode ketika Ki Hadjar Dewantara berada di STOVIA tidak menjadi naratif historis bangsa, yang berakibat juga pada hilangnya Ki Hadjar Dewantara dalam narasi besar kelahiran Budi Utomo dan perannya dalam konteks politik sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Dibandingkan dengan ikatan Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswa yang begitu diingat, keberadaan Ki Hadjar Dewantara di STOVIA selama lebih dari lima tahun dan partisipasinya dalam proses pembentukan dan perjalanan awal Budi Utomotidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak anak bangsa selama ini tidak mengetahui bahwa Ki Hadjar Dewantara muda pernah menggantungkan asanya untuk menjadi seorang dokter, cita-cita yang bahkan tetap menjadi harapan banyak anak-anak dan orang tua di Indonesia sampai saat ini. Hegemoni Soetomo dan Wahidin Soedirohoesodo yang sangat besar dalam sejarah Budi Utomo menyisihkan figur-figur lain, dan salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sebuah kajian sejarah tentang peran STOVIA dalam pergerakan nasional Indonesia, sama sekali tidak memunculkan nama Ki Hadjar Dewantara di dalamnya (Siti Maziyah: 2009). Sementara itu karena Ki Hadjar Dewantara memang tidak pernah menyelesaikan studinya di STOVIA, maka ia juga tidak dikategorikan sebagai alumni STOVIA yang berperan dalam bidang politik pada masa kolonial Belanda (Dita Wulansari & Corry Liana: 2013).

Padahal jika keberadaan Ki Hadjar Dewantara di STOVIA ditempatkan pada konteks sejarah perkembangan kesadaran kebangsaan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara muda adalah bagian dari komunitas para siswa-mahasiswa pendidikan kedokteran yang kemudian melahirkan Budi Utomo, salah satu simbol penting dari kebangkitan kesadaran kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20. Proses kehidupan bermasyarakat yang berlangsung di STOVIA dimana anak-anak muda dari berbagai penjuru kepulauan Indonesia saling berinteraksi dalam waktu yang panjang, telah membuka kesempatan untuk membangun pengalaman bersama. Hal ini memberi bekal yang lebih dari cukup, yang akhirnya memproduksi pengetahuan dan kesadaran bersama tentang sebuah identitas yang berbeda dari masyarakat dan kekuasaan kolonial pada saat itu.

Merujuk pada fakta sejarah yang membuktikan bahwa rumah E.F.E. Douwes Dekker menjadi semacam “perspustakaan” atau “ruang bertemu” bagi para siswa STOVIA setelah ia kembali dari pembuangan karena keterlibatan dalam perang di Afrika Selatan pada tahun 1903 (Paul W. Van der Veur: 1958), bukan sesuatu yang berlebihan jika dibayangkan

bahwa salah satu siswa haus bacaan dan senang berdiskusi yang datang ke rumah wartawan yang radikal ini adalah Ki Hadjar Dewantara muda. Bagi Ki Hadjar Dewantara, ide-ide tentang kebangsaan yang inklusif E.F.E. Douwes Dekker bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Soetomo secara tegas menyatakan ide inklusif E.F.E. Douwes Dekker itu adalah sesuatu yang “tidak dianut” oleh dirinya dan Budi Utomo (Akira Nagazumi: 1986). Ki Hadjar Dewantara di kemudian hari menyatakan lebih sepakat pada ide pria Indo-Eropa dari ayah Belanda dan ibu campuran Jerman-Jawa ini, daripada prinsip yang dianut Soetomo.

Menurut beberapa biografi yang sudah pernah ditulis, Ki Hadjar Dewantara muda bukan orang muda yang menerima begitu saja kehidupan asrama yang dibatasi oleh berbagai peraturan. Pada suatu hari di STOVIA, ia pernah dihukum dalam ruang isolasi karena menyulut petasan di lingkungan asrama untuk merayakan Idulfitri yang dinyatakan terlarang (Pranata SSP: 1959; Darsiti Soeratman: 1986), sesuatu yang dipastikan tidak akan pernah dilakukan oleh para siswa yang biasa-biasa saja.

Merujuk pada konteks sosial politik dari keberadaan STOVIA dalam keseluruhan sistem dan masyarakat kolonial, tindakan Ki Hadjar Dewantara muda menyulut petasan bukan sekedar kenakalan anak muda, melainkan sangat mudah dapat dihubungkan dengan sebuah perlawanan terhadap hegemoni kolonialisme yang terbiasa diskriminatif dan segregatif, terutama terhadap para siswa bumiputra dan kebudayaannya. Letusan mercon itu tidak semata-mata untuk menyemarakkan hari raya yang selalu ditunggu-tunggu oleh Ki Hadjar Dewantara muda yang dibesarkan dalam tradisi komunitas bangsawan Pakualaman yang dekat dengan Islam, melainkan simbol dari letusan sikap politiknyaterhadap berbagai larangan yang selalu harus dipatuhi karena dirinya seorang bumiputra yang sedang belajar di sekolah yang dijalankan dengan prinsip-prinsip kolonialisme.

Ki Hadjar Dewantara muda tentu saja bukan satu-satunya pribadi yang berani menyatakan ketidakpatuhannya terhadap hegemoni kolonial yang mengatur kehidupan STOVIA pada waktu itu, walaupun disadari bahwa jumlah mereka tidak terlalu banyak. Seiring dengan berbagai perubahanyang terjadi baik di luar maupun di dalam lingkungan STOVIA, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh pada para penghuni asrama, yang bermuara pada pembentukan sebuah organisasi modern yang diberi nama Budi Utomo pada 20 Mei 1908.

Ketika Budi Utomo didirikan, Ki Hadjar Dewantara muda tentu saja ada di dalam komunitas para perintis kesadaran kebangsaan Indonesia itu. Peristiwa itu terjadi kurang lebih lima tahun sejak ia memulai pendidikannya di STOVIA, dan dipastikan ia juga menjadi bagian dari komunitas yang mendengar baik secara langsung maupun tidaklangsung ide-ide kemajuan dan perubahan yang disampaikan Wahidin Soedirohoesodo kepada anak-anak muda yang sedang belajar di sekolah kedokteran itu. Seperti tercatat dalam dokumen-dokumen dan berbagai kajian yang ada, ide Wahidin Soedirohoesodo menjadi buah bibir para mahasiswa STOVIA dan terus menjadi bahan diskusi sepanjang awal abad ke-20, baik diantara mereka yang mendukung maupun tidak (Akira Nagazumi: 1989).

Pada saat Budi Utomo didirikan, usia Ki Hadjar Dewantara telah genap 19 tahun, sebuah usia yang dapat dipastikan ketika seseorang seperti dia akan sangat mudah tertarik pada ide-ide politis yang kampanye oleh Wahidin Soedirohoesodo tentang perlunya mengubah tatanan masyarakat kolonial yang sangat merugikan penduduk bumiputra. Pernyataan ini bukan sesuatu yang berlebihan, beberapa fakta sejarah menunjukkan bahwa Ki Hadjar Dewantara bersama kakaknya Soerjopranoto telah mendiskusikan tentang ide untuk mendirikan sebuah organisasi modern untuk mengkonsolidasi para pelajar dan mahasiswa sebelum Budi Utomo dideklarasikan. Upaya itu memang belum berhasil diwujudkan, ketika Soetomo dan teman-temannya akhirnya mendirikan Budi Utomo. Dari hal itu sekaligus dapat disimpulkan bahwa hanya eksklusivitas historiografis yang terjadi selama inilah yang menjadi sebab mengapa tidak ada upaya yang serius untuk mengkaitkan fakta-fakta di sekitar periode-periode awal dari kebangkitan kebangsaan Indonesia dengan aktivitas politik Ki Hadjar Dewantara.

Akibatnya, tidak ada ruang bagi Ki Hadjar Dewantara dalam sejarah Budi Utomo. Nama Ki Hadjar Dewantara baru diinklusi ke dalam sejarah politik pergerakan kebangsaan Indonesia setelah ia bergabung dengan Indische Partij dan akhirnya Komite Bumiputra, kegiatan yang akhirnya membawa dirinya bersama-sama Tjipto Mangoenkoesoemo dan E.F.E. Douwes Dekker ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa kolonial. Narasi sejarah yang ada selama ini terasa dipaksakan, Ki Hadjar Dewantara menjadi radikal dan revolusioner di Indische Partij dan Komite Bumiputra secara tiba-tiba, tanpa proses awal yang berarti. Padahal fakta sejarah membuktikan bahwa ia pernah menjadi pengurus Budi Utomo dan ikut serta mempersiapkan kongres pertama organisasi ini di Yogyakarta (Darsiti Soeratman: 1986; Abdurrachman Surjomihardjo: 1969), sebelum akhirnya bergabung dengan Sarekat Islam.

STOVIA dan Budi Utomo pada dasarnya dapat dikatakan sebagai ruang politik penting dimana Ki Hadjar Dewantara belajar dan membangun lembar demi lembar ide-ide kebangsaannya, yang tidak lagi hanya sebatas agama dan etnisitas yang diwarisi karena kelahiran dan masa kanak-kanaknya, melainkan bertransformasi menjadi identitas baru bernama Indonesia sebagai antitesis dari masyarakat dan kekuasaan kolonial. Merujuk pada penjenjangan proses pendidikan yang berlaku di perguruan Taman Siswa yang dibagi menjadi taman indria (taman kanak-kanak), taman muda (pendidikan dasar), taman dewasa (pendidikan menengah pertama), dan taman madya (pendidikan menengah atas), maka dapat disimpulkan bahwa Ki Hadjar Dewantara melewati masa dewasa dan kemadayaan dalam proses perkembangan psikologisnya di STOVIA, dan dilanjutkan keserjanaannya di Budi Utomo. Pengalaman hidup yang mampu membangun fondasi yang kuat secara akal budi dan hati nurani itu ditimba selama belajar di STOVIA dan Budi Utomo, seiring dengan proses transformasi dirinya dari anak-anak menjadi keutuhan pribadi sebagai generasi muda lengkap dengan kesadaran identitas dan entitas baru bernama Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara muda memang tidak pernah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, tetapi STOVIA telah mewariskan bekal yang luar biasa bagi pemikiran, ideologi, dan tindakan politiknya di kemudian hari. Di dalam berbagai acuan yang ada,

terdapat dua alasan mengapa Ki Hadjar Dewantara tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di STOVIA, yaitu kondisi keuangan keluarga yang terbatas dan karena sakit. Walaupun ada kesangsian terhadap dua alasan itu, data-data yang tersedia sampai saat ini belum mampu menghadirkan penjelasan lain yang lebih kuat, kecuali berbagai hipotesis yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Terlepas dari semua itu, lembaga pendidikan kedokteran yang pada awalnya dibentuk untuk kepentingan kolonial, dalam prosesnya menjadi ladang luas yang subur bagi tumbuh dan berseminya benih-benih kesadaran kebangsaan Indonesia (Dita Wulan Sari dan Corry Liana: 2013). Semua itu akhirnya menjadi sumber daya utama bagi perjuangan Ki Hadjar Dewantara untuk ikut serta melawan kolonialisme dan imperialisme, dengan segala akibat yang harus ditanggungnya dalam membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Narasi nasional sejarah Indonesia tentang Budi Utomo yang ada selama ini dapat saja dikatakan tidak dapat dibantah kebenarannya (Abdurrachman Surjomihardjo: 1980; Akira Nagazumi: 1989). Dibandingkan dengan Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Goenawan Mangoenkoesoemo, Ki Hadjar Dewantara dapat saja tidak dianggap sebagai figur penting dalam proses perjalanan sejarah Budi Utomo sebagai simbol politis pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun eksistensi dari legasi Budi Utomo sebagai organisasi yang menjadi pelopor kebangkitan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Ki Hadjar Dewantara.

Sebagai salah satu organisasi pelopor, hari pembentukannya tanggal 20 Mei 1908 mulai diperingati sejak setahun pertama. Pada awalnya peringatan itu hanya dilakukan oleh lingkaran dalam Budi Utomo, namun setelah berjalan beberapa waktu hari ulang tahun Budi Utomo juga dirayakan oleh para simpatisannya yang lebih luas. Peringatan itu mulai mencapai puncak pertamanya pada tahun 1918 di negeri penjajah, ketika para mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang wilayah, etnik, agama, dan ideologi politik di Indonesia bersama para Indo-Eropa dan Belanda totok memperingati 10 tahun kelahiran Budi Utomo di Belanda.

Dalam kenyataannya, Ki Hadjar Dewantara yang berstatus sebagai orang buangan dalam pengasingan pada waktu itu (Joss Wibisono: 2014; Gorfasi Tasen: 2015) adalah salah satu diantara para aktivis pergerakan kebangsaan Indonesia yang bersuka cita, mengumandangkan Indonesia di pusat kekuasaan kolonial. Menyusul keberhasilan kegiatan *Indische Kunstavond* di Den Haag yang telah dimulai pada Maret 1916 dimana Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu figur penting dibalik pertunjukan kesenian tersebut (Matthew Isaac Cohen: 2014), perayaan 10 tahun Budi Utomo juga dirayakan dengan pertunjukan kesenian. Ki Hadjar Dewantara yang pada waktu itu tidak lagi berstatus sebagai orang hukuman dan sedang menunggu kesempatan untuk kembali ke tanah air, juga ikut serta dalam pertunjukan sebagai penari.

Sementara itu sebuah buku juga diterbitkan khusus untuk perayaan itu. Ki Hadjar Dewantara menulis sebuah artikel di dalamnya. Walaupun begitu, memori kolektif bangsa secara umum tetap saja muncul beranggapan bahwa tidak ada yang istimewa dalam

hubungan antara Ki Hadjar Dewantara dan Budi Utomo. Akan tetapi kesan tersebut harus segera ditinjau ulang setelah membaca sebuah tulisan lain yang diterbitkan beberapa saat setelah perayaan itu. Di dalam tulisan itu Ki Hadjar Dewantara secara tegas menyatakan “maka menjadi jelaslah bahwa hari 20 Mei tidak lagi merupakan hari milik partai itu, tetapi hari milik bangsa Hindia pada umumnya” (Akira Nagazumi: 1989), bangsa yang lahir berdasarkan prinsip kebangsaan inklusif sebagaimana yang ia perjuangkan bersama Tjipto Mangoenkoesomo dan E.F.E. Douwes Dekker dan ditentang secara keras oleh penguasa kolonial (Savitri Prastiti Scherer: 1985; Wildan Sena: 2014).

Tanggal pembentukan Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional telah lahir dalam tulisan Ki Hadjar Dewantara itu. Tonggak perjalanan nasionalisme Indonesia itu kemudian ditegaskan dalam perayaan di tahun 1938, walaupun masih dalam suasana kolonial. Makna simbolik itu semakin dipertegas pada perayaan 20 Mei 1948, ketika Indonesia telah menjadi negara yang merdeka namun sedang menghadapi usaha Belanda untuk membangun kembali kekuasaan kolonialnya. Bisa saja semua kegiatannya dalam Budi Utomotidak diakui, namun berbekal prinsip kebangsaan yang inklusif dan visi politik kebangsaan yang luas dan panjang. Ki Hadjar Dewantara telah mewariskan kepada bangsa Indonesia hari kebangkitan nasionalnya, layaknya sebuah mitos yang selalu berfungsi integratif untuk menjaga tetap hidup bersama sebagai sebuah bangsa.

6. PENUTUP

Realitas historiografi dari pengalaman politik Ki Hadjar Dewantara ini memperkuat hasil kajian sebelumnya bahwa konstruksi sejarah Indonesia ternyata masih sangat tergantung dengan cetak biru alur berpikir dalam tradisi besar orientalisme. Tanpa ada tendensi mengesampingkan pencapaian yang telah dilakukan selama ini, perkembangan historiografi Indonesia belum benar-benar mengacu pada tradisi indonesiasentris yang disebut oleh Moh. Ali sebagai Ilmu Sejarah Indonesia. Keilmuan sejarah yang dipraktikkan tidak mampu keluar dari pola umum, atau sekedar mereproduksi pendapat para sejarawan asing khususnya Barat yang masih mengacu pada perspektif kolonialsentris. Kerangka berpikir sejarah yang dipayungi oleh rasionalisme dan sekulerisme Barat yang didasarkan pada kebudayaan dan pengalaman sejarah di Eropa beserta satelit-satelitnya itu, ternyata tidak selalu bermanfaat untuk menghadirkan realitas dari pengalaman sejarah Indonesia.

Secara metodologis, paling tidak ada satu hal yang alpa dilakukan, yaitu menghadirkan kenyataan tersembunyi dari pantulan kaca sebuah peristiwa yang terjadi sebagai fakta simbolis. Sebagai manusia Indonesia dari Jawa dan beragama yang telah mencapai salah satu titik ketulusan spiritualitas yang tinggi, Ki Hadjar Dewantara tidak lagi berprinsip bahwa politik sebagai sebuah praktik kekuasaan melainkan cukup sebagai “kepala keluarga”, yang ketika di depan mampu memberi suri tauladan, di tengah mampu memberi inspirasi, dan di belakang mampu memberi dorongan. Kegiatan pendidikan dan kebudayaan yang berpusat pada Taman Siswa hanya merupakan realitas simbolis dari kenyataan politik Ki Hadjar Dewantara, yang dilakukannya dengan akal budi dan sekaligus hati nurani. Prinsip harus

adanya pendidikan nasional dan kebudayaan nasional yang dikembangkan di Taman Siswa, merupakan perwujudan dari praktik politik Ki Hadjar Dewantara sebagai warganegara yang merdeka, tidak lagi hanya sebagai hamba jajahan dari sebuah kekuasaan kolonial (Bambang Purwanto: 2019).

Pada 3 Juli 2022, Taman Siswa akan genap berusia satu abad. Menurut Kenji Tsuchiya, tidak ada yang membayangkan sebelumnya bahwa lembaga yang memiliki makna sebagai taman untuk para murid belajar ini ternyata tumbuh menjadi sebuah lahan persemaian dan tempat berseminya perlawanan yang tangguh terhadap kekuasaan kolonial Belanda pada 1930-an (Kenji Tsuchiya: 1975). Ki Hadjar Dewantara menjadikan Taman Siswa bukan hanya sebagai sebuah lembaga pengajaran dan pendidikan, melainkan representasi dari jati diri merdeka dari kesadaran kebangsaan Indonesia. Semua kegiatan Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan perwujudan dari kesadaran kebangsaan Indonesiannya, sebuah politik identitas untuk membedakan diri dari kolonialisme Belanda.

Taman Siswa berbeda dengan SI dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mengandalkan aksi massa melalui berbagai demonstrasi dan pemogokan yang riuh untuk menunjukkan keradikalannya. Taman Siswa juga berbeda dengan PNI, yang mengandalkan kemampuan Soekarno sebagai seorang orator untuk menunjukkan militansinya. Taman Siswa bersama Ki Hadjar Dewantara hadir secara konsisten dengan militansi “politik alus” yang diinspirasi kebudayaan Jawa menolak intervensi pemerintah kolonial dalam kegiatannya, biarpun ketika kebijakan penguasa kolonial semakin ketat dan opresif. Taman Siswa juga berbeda dengan Muhammadiyah, yang secara tegas mendasarkan dirinya pada agama Islam. Pada pidato pendirian Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara secara tegas menyatakan bahwa para generasi muda harus dibekali dan memiliki kemampuan mengembangkan kebudayaan nasional melalui sistem pendidikan nasional sebagai antitesa terhadap pendidikan kolonial (David Radcliffe: 1971; Abdurrachman Surjomihardjo: 1986). Sifat kebangsaan ini kemudian ditunjukkan secara eksplisit pada nama resmi Taman Siswa, yaitu Peguruan Nasional Taman Siswa.

Sebagai sebuah badan wakaf yang secara terbuka menyatakan independensinya secara finansial dan hidup saling membantu diantara keluarga besarnya, Taman Siswa menolak dana bantuan dari pemerintah kolonial. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidaksetujuan Ki Hadjar Dewantara terhadap terhadap sistem dan filsafat pendidikan yang mendasari keberadaan sekolah-sekolah yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda (David Radcliffe: 1971). Pada tataran ini, Ki Hadjar Dewantara melalui Taman Siswa selalu hadir dengan agitasi politiknya terhadap kekuasaan kolonial sebagai perwujudan dari mentalitas kebangsaannya.

Di sekolah-sekolah Taman Siswa yang tersebar di 52 cabang di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Madura pada saat kongres nasional pertama Agustus 1930, suasana kesadaran dan gerakan kebangsaan Indonesia terasa begitu kental. Padahal, para pamong Taman Siswa secara eksplisit dilarang untuk mengajarkan politik kepada para siswa dan dilarang menjadi anggota partai politik. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk perlawanan Ki Hadjar Dewantara terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda terhadap

sekolah swasta melalui Ordonansi Sekolah Partikelir (*Ordonnantie Particulier Onderwijs*) Stadsblaad 494 tahun 1932, yang lebih dikenal sebagai Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*).

Melalui peraturan ini, pemerintah kolonial dapat membubarkan sekolah swasta yang dianggap tidak mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Bagi Ki Hadjar Dewantara, peraturan itu bukan hanya sekedar kebijakan penyelenggaraan sekolah dan pengajarannya, melainkan persoalan pemberangusan terhadap politik identitas kebangsaan Indonesia yang sedang terus diperjuangkan melalui pendidikan. Akibatnya, Ki Hadjar Dewantara menjadi salah satu figur terdepan yang menolak ordonansi tersebut melalui kehalusan dan kecerdasan berpolitiknya. Semua itu dilakukan salah satunya untuk menghalangi terbentuknya kebudayaan imitasi pada penduduk bumiputra, yang disebabkan oleh pengadopsian kebudayaan Barat melalui struktur dan sistem pendidikan kolonial.

Keberadaan Pancadarma yang terdiri dari kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan sebagai dasar dari Taman Siswa, semakin memperkuat kesimpulan bahwa Ki Hadjar Dewantara tidak pernah berhenti berpolitik dengan akal budi dan hati nurani sampai akhir hayatnya dengan tujuan bukan untuk kekuasaan. Bukan sebuah harapan yang berlebihan jika sikap militansi “politik alus” Ki Hadjar Dewantara seharusnya diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Beberapa tulisan Ki Hadjar Dewantara seharusnya menjadi bacaan wajib bagi semua warganegara Indonesia, agar jati diri kebangsaan Indonesia yang inklusif dapat terus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang paling pertama yang harus dibaca adalah “Djika Saja Nederlander” atau “*Als ik eens Nederlander was*”³, agar semua warganegara menyadari kedudukan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dan akhirnya menyadur ucapan Presiden Soekarno, agar semua anak cucu pewaris Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat terus merayakan hari kebangkitan nasional Indonesia seribu tahun lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, (2012). “Dari Hasrat ‘Kemajuan’ ke Pembentukan Bangsa”, Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (eds)., *Indonesia dalam Arus Sejarah 5*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 63-99
- Ardhana, I Ketut, (2012). “Pergerakan Nasional dan Sistem Kepartaian”, Taufik Abdullah dan A.B. Lopian, ed., *Indonesia dalam Arus Sejarah 5*. Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve, hlm. 377-403
- Bonneff, Marcel and Crossley, Susan, (1993). “Ki Ageng Suryomentaraman, Javanese Prince and Philosopher (1892-1962)”, *Indonesia* , No. 57, pp. 49-69
- Budiawan, (2006). *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*. Yogyakarta: LkiS.

³ Hal ini memunculkan ide bahwa seharusnya tulisan Ki Hadjar Dewantara ini dicetak atas biaya negara dalam tiga Bahasa yaitu Indonesia, Inggris, dan Belanda, untuk menjadi souvenir pengunjung Museum Pergerakan Nasional di Jakarta dan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta.

- Cohen, Matthew Isaac, (2014). "Indonesian Performing Arts in the Netherlands, 1913–1944. Bart Barendregt and Els Bogaerts (ed.), *Recollecting Resonances. Indonesian-Dutch Musical Encounters*. Leiden: Brill, pp. 231-158
- Dewantara, Ki Hadjar, (1967). "Some Aspects of National Education and The Taman Siswa Institute of Jogjakarta", *Indonesia*, 4, pp. 150-168
- Elson, Robert, (2008). *The Idea of Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartodirdjo, Sartono, (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kelch, Kristina, (2014). "Becoming History. Taman Siswa and Its Influence on the Indonesian National Education", *Master Thesis*, Leiden: Leiden University.
- Koch, D.M.G., (1951). *Menuju Kemerdekaan. Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*. Djakarta: Jajasan Pembangunan.
- Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lee, Kam Hing, (1975). "The Taman Siswa in Postwar Indonesia", *Indonesia*, 25, pp. 41-59.
- Marihandono, Djoko (ed.), (2017). *Perjuangan Ki Hajar Dewantara: Dari Politik ke Pendidikan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Maziyah, Siti, (2009). "Peran STOVIA dalam Pergerakan Nasional di Indonesia", Semarang: Universitas Diponegoro.
- McVey, Ruth T., (1967). "Taman Siswa and the Indonesian National Awakening", *Indonesia*, 4, pp. 128-149
- Nagazumi, Akira, (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Grafiti.
- Nayono et al. (ed.), (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian II: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- O'Malley, William J. (1978). "The Pakempalan Kawulo Ngajogjakarta: An Official Report on the Jogjakarta's People Party of the 1930s", *Indonesia*, 26, pp. 111-158.
- Purwanto, Bambang, (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Radcliffe, David, (1971). "Ki Hadjar Dewantara and the Taman Siswa Schools; Notes on an Extra-Colonial Theory of Education", *Comparative Education Review*, 15/2, pp. 219-226.
- Ricklefs, M. C., (2008). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Scherer, Savitri Prastiti, (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan. Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sena, Wildan, (2014). "Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914", *Lembaran Sejarah*, 11/1, hlm. 51-69.

- Soeratman,Darsiti, (1986). *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- SSP, Pranata, (1959). *Ki Hadjar Dewantara. Perintis Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Surjomihardjo, Abdurrachman, (1964). “Analysis of Suwardi Surjaningrat’s Ideals and National-revolutionary Actions: 1913-1922”. *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, pp.371-406.
- , (1980). *Budi Utomo Cabang Betawi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- , (1986). *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tasen, Gerfasius, (2015). “Pengasingan Ki Hajar Dewantara (1913-1917)”. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tsuchiya, Kenji, (1975). “The Taman Siswa Movement: Its Early Eight Years and Javanese Background”. *Journal of Southeast Asian Studies* , 6/2, pp. 164-177.
- , (1992). *Demokrasi dan Kepemimpinan. Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Universitas Gadjah Mada, (1956). “Pidato-pidato pada Peringatan Dies Natalis ke VII Universitas Gadjah Mada dan Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada kepada Ki Hadjar Dewantara”. Jogjakarta.
- van der Vuer, Paul W., (1958). “E.F.E. Douwes Dekker. Evangelist for Indonesian Political Nationalism”, *The Journal of Asian Studies*. 7/4, pp. 551-566.
- Wibisono, Joss, (2014). “Soewardi di Pengasingan: Nasionalisme Versus Sosialisme”. *Lembaran Sejarah*, 11/1, hlm. 1-24.
- Wulansari, Dita&Liana, Corry, (2013). “Peran Dokter-Dokter Bumiputera Alumni Stovia di Bidang Politik (1900-1930)”, *Avatara*, 1/2,hlm.167-177.
- Yamamoto, Nobuto, (2014). “The Dynamic of Contentious Politics in Indies: Inlandsche Journalisten Bond and Persatoen Djoernalis Indonesia”. *Keio Communication Review*,36, pp. 5-20.